

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BADUNG
MENURUT PENGELUARAN**

2016-2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BADUNG
MENURUT PENGELUARAN**

2016-2020



Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran 2016-2020

*Gross Domestic Regional Product of Badung Regency by
Expenditure 2016-2020*

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi/Publication Number: 51030.2104

Katalog/Catalog: 9301005.5103

Ukuran Buku/Book Size: 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv + 104 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

BPS Kabupaten Badung

Penyunting/Editor:

BPS Kabupaten Badung

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Integrated Processing and Statistics Dissemination Section

Penerbit/Published by:

BPS Kabupaten Badung/*BPS-Statistics Badung Regency*

Pencetak/Printed by:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi/Graphics by: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of
all this book for commercial purpose without permission from BPS-
Statistics Indonesia*

Tim Penyusun

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung
Menurut Pengeluaran 2016 – 2020**

Penanggung Jawab Umum:

Dr. Yudi Agusta, M.Sc

Editor:

Ayu Manik Pratiwi, SST., M.Si

Penulis:

Desak Gede Prita Widia Wiriyanti, SST

Disain Cover:

Seksi IPDS Kabupaten Badung

KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya publikasi “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Publikasi ini khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Data PDRB pada publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* sesuai dengan rekomendasi *United Nations*.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Komponen yang tercakup dalam PDRB menurut pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor, dan Impor. Besaran setiap komponen ditampilkan dalam analisis deskriptif, yang diharapkan dapat menggugah minat para pengguna data baik penentu kebijakan maupun kalangan akademisi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian publikasi ini. Semoga dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang memerlukan. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang.

Mangupura, April 2021
Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
Kepala,



Dr. Yudi Agusta, M.Sc

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	8
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	17
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	19
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	22
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	25
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	29
2.5 Perubahan Inventori.....	33
2.6 Ekspor Impor.....	38
BAB III TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BADUNG	41
3.1 Tinjauan Agegat PDRB Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran.....	44
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	53
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	58
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	60
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	64
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	67
3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang Dan Jasa Luar Negeri.....	69

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BADUNG MENURUT PENGELUARAN.....	75
4.1	PDRB (Nominal).....	77
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Net Ekspor	80
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	82
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	84
4.5	Perbandingan Net Ekspor Terhadap PMTB	85
4.6	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	87
4.7	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	89
BAB V	PENUTUP	91
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Saran	95
LAMPIRAN	97

TABEL 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Miliar Rp).....	45
TABEL 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Miliar Rp).....	46
TABEL 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Persen).....	48
TABEL 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Persen).....	51
TABEL 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020.....	52
TABEL 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung, 2016-2020.....	55
TABEL 7.	Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung, 2016-2020.....	57
TABEL 8.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung, 2016-2020.....	58
TABEL 9.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Badung, 2016-2020 (Miliar Rupiah).....	60
TABEL 10.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Badung, 2016-2020.....	61

DAFTAR TABEL

TABEL 11.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Badung, 2016-2020.....	66
TABEL 12.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Badung, 2016-2020.....	68
TABEL 13.	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Badung, 2016-2020.....	70
TABEL 14.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Badung, 2016-2020.....	78
TABEL 15.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Net Ekspor, 2016-2020.....	81
TABEL 16.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2016-2020.....	83
TABEL 17.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Badung, 2016-2020.....	85
TABEL 18.	Rasio Net Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2016-2020.....	86
TABEL 19.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Badung, 2016-2020.....	88
TABEL 20.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Badung, 2016-2020.....	90



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Miliar Rp).....	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Juta Rupiah).....	99
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Juta Rupiah).....	100
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (persen).....	101
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (persen).....	102
Lampiran 5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020.....	103
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020.....	104



Bab 1

Pendahuluan

1.1 Pengertian Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi

menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke

waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (*final output*)**”. Mengaitkan

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
$GFCF$ (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta \text{ Inventori}$	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan $GFCF$ serta $\Delta \text{ Inventori}$ merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan

barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan

pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara

internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB di antaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;

⁴ SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing”

- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 di antaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri

- peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan

sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



Bab 2

Metode Estimasi

Dan Sumber Data

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PKRT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran

7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PKRT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PKRT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PKRT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;

5. Diperoleh nilai PKRT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga berlaku);
6. Susun Indeks implisit PKRT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PKRT atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PKRT Triwulanan diestimasi menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga berlaku);

5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun

moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut

biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia

- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga berlaku = Output + Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga konstan diestimasi dengan *deflate* PK-P atas dasar harga berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Provinsi atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Provinsi atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan

keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai

barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS

- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v. Metoda Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara *deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB sebagai

berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply:

PMTB atas dasar harga berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi:

PMTB atas dasar harga konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 Perubahan Inventori

i. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam

bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi

pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi

belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan, BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang,

BPS;

5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga berlaku =

$(\text{Volume inventori } (t) - \text{Volume inventori } (t-1)) \times \text{Harga per unit}$

PI atas dasar harga konstan =

$\text{PI atas dasar harga berlaku} / \text{IHPB}$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga konstan =

Inventori (t) atas dasar harga berlaku/IHPB (t) -

Inventori ($t-1$) atas dasar harga berlaku/IHPB ($t-1$)

PI atas dasar harga berlaku =

PI atas dasar harga konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6. Ekspor Impor

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii. Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



Bab 3

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Badung

Selama sepuluh tahun terakhir banyak perubahan yang terjadi pada perekonomian baik itu global, nasional maupun regional yang berpengaruh pada perekonomian lokal khususnya Kabupaten Badung. Di tengah perekonomian terbuka seperti sekarang ini, perekonomian Kabupaten Badung selain dipengaruhi oleh faktor di dalam Kabupaten Badung sendiri, juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian antar kabupaten di Bali, perekonomian nasional bahkan dunia. Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten yang sangat menggantungkan perekonomiannya dari sektor pariwisata, tentu sangat dipengaruhi oleh perekonomian dunia.

Pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia juga berdampak pada perekonomian Bali. Pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 menyebabkan pariwisata Bali terdampak parah. Akses kunjungan ke Bali yang sempat dibatasi hingga ditutup sangat berdampak pada lumpuhnya pariwisata Bali. Penutupan bandara dan pelabuhan menyebabkan proses ekspor impor menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan perekonomian Bali terganggu, sehingga pertumbuhan ekonomi Bali merosot.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Badung digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian

lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. Tinjauan Agegat PDRB Kabupaten Badung Menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Kabupaten Badung selama tahun 2020 untuk pertama kalinya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami kontraksi. Fenomena ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Pandemi ini melumpuhkan pariwisata Bali. Pariwisata merupakan mata pencaharian penduduk Bali khususnya di Kabupaten Badung, dimana yang paling dominan adalah wilayah Kabupaten Badung bagian selatan seperti Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Badung selama periode tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Namun PDRB pada tahun 2020 tidak mampu melebihi angka tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Badung sebesar Rp. 47.208,2 miliar dan terus meningkat menjadi Rp. 62.723,4 miliar pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB menjadi Rp. 49.215,3 miliar.

Selain dinilai atas dasar harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. PDRB ADHK ini dimaksudkan bahwa berbagai produk yang dihitung tersebut dinilai dengan harga pada tahun 2010. Berdasarkan penghitungan PDRB ADHK, akan dapat dilihat gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitasnya saja tanpa ada pengaruh harga. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

TABEL 1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	19 303,8	20 631,8	22 501,9	24 356,4	24 368,6
2. Konsumsi LNPR	246,3	260,0	288,3	327,8	321,1
3. Konsumsi Pemerintah	3 333,4	3 837,2	4 185,2	4 364,6	4 511,3
4. PMTB	17 522,5	18 927,2	21 429,0	22 461,1	20 214,4
5. Perubahan Inventori	139,8	198,3	216,5	185,8	143,7
6. Net Ekspor	6 662,5	8 489,2	9 170,4	11 027,6	(343,9)
Total PDRB	47 208,2	52 343,7	57 791,3	62 723,4	49 215,3

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu 2016-2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Badung berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari 2016-2019, namun mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2016, PDRB ADHK Kabupaten Badung mencapai Rp. 31.157,4 miliar, terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai Rp. 37.325,3 miliar. Namun, pada tahun 2020 hanya mencapai Rp. 31.159,9 miliar.

TABEL 2.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020
 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	14 272,7	14 873,8	15 568,5	16 414,9	15 705,0
2. Konsumsi LNPRT	156,0	162,4	176,0	195,2	190,1
3. Konsumsi Pemerintah	2 238,3	2 417,1	2 552,1	2 625,5	2 554,7
4. PMTB	12 890,4	13 644,7	14 795,0	15 403,8	13 412,6
5. Perubahan Inventori	64,4	68,8	72,9	67,4	60,6
6. Net Ekspor	1 535,7	1 885,3	2 110,7	2 618,6	(763,1)
Total PDRB	31 157,4	33 052,0	35 275,4	37 325,3	31 159,9

Keterangan:

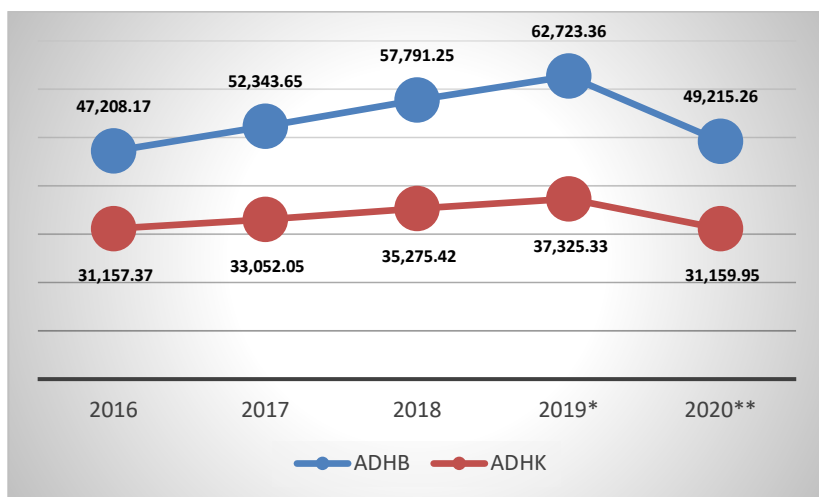
*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Grafik 1, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku, selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah diiadakan.

GRAFIK 1.

Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Miliar Rp)



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi

impor. Sebagian besar produk yang dihasilkan, digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

TABEL 3.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	40,89	39,42	38,94	38,83	49,51
2. Konsumsi LNPRT	0,52	0,50	0,50	0,52	0,65
3. Konsumsi Pemerintah	7,06	7,33	7,24	6,96	9,17
4. PMTB	37,12	36,16	37,08	35,81	41,07
5. Perubahan Inventori	0,30	0,38	0,37	0,30	0,29
6. Net Ekspor	14,11	16,22	15,87	17,58	-0,70
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2020 mencapai 49,51 persen. Cenderung memiliki kontribusi yang meningkat tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran terhadap konsumsi rumah tangga secara rata-rata selama lima tahun menyumbang sebesar 41,52 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku. Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Badung juga memberikan kontribusi yang cukup besar dari keseluruhan pengeluaran. Pada tahun 2016 peranan pengeluaran PMTB mencapai 37,12 persen.

Cenderung meningkat hingga pada tahun 2018 peranannya mencapai 37,08 persen. Hal ini tentunya didorong oleh penyelesaian beberapa mega proyek yang ada di Kabupaten Badung dalam rangka menyambut kegiatan besar *Annual Meeting IMF-World Bank* yang dilakukan pada akhir tahun 2018 di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Sementara itu, di tahun 2019, peranan pengeluaran PMTB terhadap PDRB Kabupaten Badung mengalami sedikit penurunan seiring dengan berkurangnya proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Badung menjadi 35,81 persen. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga mencapai 41,07 persen.

Selain pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Badung juga didorong oleh ekspor impor. Sebagai destinasi pariwisata terbesar di Bali, Kabupaten Badung mampu melakukan ekspor terutama ekspor jasa kepada para wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik luar Badung. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019 kondisi net ekspor Kabupaten Badung selalu mengalami surplus yaitu nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Hal ini tentunya merupakan kondisi yang baik dimana kemampuan ekspor Kabupaten Badung lebih besar dari impor selama periode lima tahun terakhir. Kondisi berbeda terjadi di tahun 2020. Net ekspor Kabupaten Badung bernilai negatif yang artinya nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Hal ini juga disebabkan oleh pandemi

covid-19 dimana kemampuan ekspor jasa maupun barang kepada para wisatawan berkurang secara drastis. Terjadinya penutupan bandara untuk penerbangan domestik maupun internasional menyebabkan pengiriman barang ke luar daerah maupun ke luar negeri terhambat sehingga mengalami penurunan nilai ekspor.

Di sisi lainnya, pengeluaran untuk konsumsi pemerintah ternyata memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar. Namun, dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan dari 6,96 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,17 persen di tahun 2020. Dua pengeluaran lainnya yaitu konsumsi LNPRT dan perubahan inventori hanya memberikan kontribusi sebesar 0,65 persen dan 0,29 persen pada tahun 2020.

Selain besaran distribusi dan besaran nominal, agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi di wilayah tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari tahun 2016 sampai dengan 2019 secara rata-rata mencapai 6,36 persen, dengan masing-masing pertumbuhan 6,81 persen tahun 2016; melambat menjadi 6,08 persen pada 2017; mengalami percepatan pada tahun 2018 menjadi 6,73 persen; tahun 2019 tumbuh melambat menjadi 5,83 persen,

dan pada tahun 2020 ekonomi mengalami kontraksi menjadi -16,52 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 (6,81 persen), sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-16,52 persen).

TABEL 4.
 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
 Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung, 2016-2020 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,70	4,21	4,67	5,44	-4,32
2. Konsumsi LNPRT	6,62	4,08	8,40	10,89	-2,61
3. Konsumsi Pemerintah	6,63	7,99	5,59	2,87	-2,70
4. PMTB	8,71	5,85	8,43	4,11	-12,93
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	6,81	6,08	6,73	5,81	-16,52

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Oleh sebab itu Kabupaten Badung termasuk salah satu pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali. Namun, kondisi berbeda terjadi pada tahun 2020. Oleh karena kondisi pariwisata Kabupaten Badung terganggu oleh pandemi covid-19 menyebabkan ekonomi Kabupaten Badung yang selama ini ditopang oleh faktor eksternal

menjadi terkontraksi cukup dalam sehingga mendorong kontraksi ekonomi Provinsi Bali.

TABEL 5.
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Badung, 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	135,25	138,71	144,53	148,38	155,16
2. Konsumsi LNPRT	157,84	160,11	163,74	167,94	168,91
3. Konsumsi Pemerintah	148,93	158,75	163,99	166,24	176,59
4. PMTB	135,93	138,71	144,84	145,82	150,71
5. Perubahan Inventori	217,15	288,20	296,90	275,77	237,02
6. Ekspor	132,67	144,75	145,80	140,32	134,32
7. Impor	115,28	130,90	130,85	121,83	125,92
Total PDRB	151,52	158,37	163,83	168,05	157,94

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit⁶ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan selama rentang waktu dari tahun 2016 sampai 2019. Indeks implisit pada tahun 2016 sebesar 151,52 lalu berkembang

⁶ Indeks perkembangan

menjadi sebesar 168,05 pada tahun 2019. Namun indeks ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 157,94.

3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga adalah salah satu mesin utama bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung. Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi yang hampir berimbang dengan PMTB dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan konsumsi akhir rumah tangga yang hampir sebesar setengah dari total PDRB setiap tahunnya, dimana konsumsi akhir rumah tangga memberikan kontribusi sekitar 38 persen sampai hampir 50 persen terhadap total PDRB.

Pada Tabel 6 di bawah terlihat bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal atas dasar harga berlaku maupun riil atas dasar harga konstan. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, nilai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan penyumbang yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Badung. Hal ini tidak terlepas dari Kabupaten Badung yang merupakan daerah migran dimana peluang ekonomi dipandang masih cukup besar sehingga jumlah penduduk meningkat setiap tahun.

Perkembangan peranan konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung selalu menurun pada periode tahun 2016-2019, namun meningkat pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada Tabel

6 yaitu proporsi penggunaan konsumsi akhir rumah tangga terhadap PDRB. Pada tahun 2016, peranan konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan hingga menjadi 40,89 persen. Namun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 peranan konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami penurunan hingga masing-masing tahun mencapai 39,42 persen; 38,94 persen dan 38,83 persen. Tahun 2020 peranan konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan tinggi yang mencapai 49,51 persen.

Di sisi lain, tahun 2016-2019 rata-rata konsumsi perkapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Selain karena jumlah penduduk, pendapatan penduduk yang meningkat yang tergambar secara tidak langsung melalui PDRB perkapita, menyebabkan pengeluaran atas konsumsi juga meningkat. Berbeda dengan kondisi tahun 2020, ekonomi Kabupaten Badung yang selama ini ditopang oleh sektor pariwisata menjadi menurun, karena adanya pandemi covid-19. Hal ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor pariwisata dan penunjang pariwisata. Menurunnya pendapatan masyarakat menyebabkan rata-rata konsumsi perkapita masyarakat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 6.
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Badung, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	19 303,8	20 631,8	22 501,9	24 356,4	24 368,6
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	14 272,7	14 873,8	15 568,5	16 414,9	15 705,0
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	40,89	39,42	38,94	38,83	49,51
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	30 640,93	32 061,85	34 254,63	36 342,04	35 668,38
b. ADHK 2010	22 655,04	23 113,85	23 699,99	24 492,48	22 987,48
Pertumbuhan⁷					
a. Total konsumsi	7,70	4,21	4,67	5,44	-4,32
b. Perkapita	5,37	2,03	2,54	3,34	-6,14
Jumlah penduduk (000 org)	630	644	657	670	683
Keterangan:					
*) Angka Sementara					
**) Angka Sangat Sementara					

Tabel 6 di atas menunjukkan pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan yang bernilai positif, tetap menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Badung mengalami peningkatan, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

secara “riil” berkisar antara 2,03 sampai dengan 5,37 persen pada tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan rata-rata konsumsi perkapita hingga mencapai -6,14 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga perkapita, laju pertumbuhan total konsumsi akhir rumah tangga juga mengalami fluktuasi yang serupa. Pertumbuhan total konsumsi berkisar antara 4,21 persen sampai 7,70 persen pada periode waktu 2016-2019. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan total konsumsi sebesar -4,32 persen.

Jika melihat struktur komponen konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung, dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir tidak terjadi perubahan struktur pembentuk komponen konsumsi akhir rumah tangga. Proporsi terbesar konsumsi rumah tangga di Kabupaten Badung didominasi oleh pengeluaran konsumsi makanan, minuman, dan rokok yaitu sebesar 19,87 persen pada tahun 2020. Selama lima tahun terakhir rata-rata proporsi konsumsi makanan, minuman dan rokok mencapai 15,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung tidak jauh berbeda dengan kabupaten/kota lain yang didominasi dengan pengeluaran pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari berupa makanan, minuman, dan rokok. Selanjutnya komponen konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Badung juga didominasi oleh konsumsi Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah

Tangga; konsumsi Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; dan konsumsi Hotel dan Restoran dengan proporsi masing-masing 7,17 persen, 6,86 persen, dan 6,35 persen pada tahun 2020.

TABEL 7.
Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Badung (Persen), 2016-2020

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	14,39	14,06	14,44	14,46	19,87
2. Pakaian dan Alas Kaki	1,21	1,19	1,15	1,15	1,50
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,34	6,06	5,61	5,43	7,17
4. Kesehatan dan Pendidikan	3,38	3,10	2,97	2,96	4,09
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,35	6,03	6,06	6,09	6,86
6. Hotel dan Restoran	6,06	6,00	5,77	5,74	6,35
7. Lainnya	3,15	2,97	2,93	3,00	3,68
Total Konsumsi	40,89	39,42	38,94	38,83	49,51

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya pada masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan rokok memiliki rata-rata peningkatan harga sebesar 4,93 persen pada tahun 2020, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 2,85 persen. Rincian

peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok masing-masing sebesar 6,79 persen (2016); 2,93 persen (2017); 6,47 persen (2018); dan 2,85 persen (2019). Rata-rata peningkatan harga yang cukup tinggi berada pada kelompok hotel dan restoran yaitu sebesar 4,97 persen pada tahun 2020.

TABEL 8.

Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Badung (Persen), 2016-2020

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,79	2,93	6,47	2,85	4,93
2. Pakaian dan Alas Kaki	5,18	3,39	0,80	2,76	1,73
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT	0,93	2,52	1,84	1,15	1,71
4. Kesehatan dan Pendidikan	4,91	2,34	0,77	5,17	4,33
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,81	1,01	3,77	2,19	-0,47
6. Hotel dan Restoran	2,69	3,01	3,76	3,18	4,97
7. Lainnya	2,02	2,89	3,02	1,70	9,44
Total Konsumsi	4,29	2,56	4,20	2,66	4,57

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yang dalam pelaksanaannya kegiatan dilakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau

kekayaan semata. Bentuk Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga misalnya Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga dan hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, serta Organisasi Bantuan Kemanusiaan/ Beasiswa. Di Indonesia, peranan lembaga non profit masih terbilang rendah, tidak seperti di luar negeri. Begitu pula halnya dengan di Kabupaten Badung, dimana peranan LNPRT paling rendah di antara semua komponen PDRB pengeluaran. Selama lima tahun berturut-turut peranan LNPRT ini tidak lebih dari satu persen dari total PDRB Kabupaten Badung.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, peranan konsumsi LNPRT di Kabupaten Badung termasuk yang paling rendah jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Proporsi konsumsi LNPRT ini dibandingkan total PDRB Kabupaten Badung hanya berkisar antara 0,50 persen sampai 0,65 persen selama periode tahun 2016 sampai 2020. Selama kurun waktu 2016-2019, total konsumsi LNPRT terus mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada tahun 2020 angka tersebut mengalami penurunan. Walaupun secara total konsumsi mengalami penurunan pada tahun 2020, namun peranan konsumsi LNPRT terhadap PDRB Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Tahun 2019 pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat hingga 10,89

persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi -2,61 persen.

TABEL 9.
Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Badung, 2016-2020
(Miliar Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	246,28	260,01	288,25	327,84	321,11
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	156,03	162,40	176,04	195,21	190,11
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,52	0,50	0,50	0,52	0,65
Pertumbuhan	6,62	4,08	8,40	10,89	-2,61

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Secara umum fungsi pemerintah dalam perekonomian modern dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan fungsi pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien, fungsi distribusi dimaksudkan pemerintah mengusahakan distribusi dan pemerataan bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi

pemerintah mempunyai peran mengusahakan stabilisasi dalam perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta (*private*) sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

TABEL 10.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Badung, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	3 333,36	3 837,17	4 185,21	4 364,59	4 511,35
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2 238,26	2 417,10	2 552,14	2 625,49	2 554,68
Proporsi terhadap PDRB	7,06	7,33	7,24	6,96	9,17
Konsumsi Pemerintah per-kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	5 291,05	5 962,97	6 371,16	6 512,37	6 603,26
b. ADHK 2010	3 552,79	3 756,18	3 885,12	3 917,47	3 739,28
Pertumbuhan⁸ (%)					
a. Total konsumsi Pemerintah	6,63	7,99	5,59	2,87	-2,70
b. Konsumsi perkapita	4,33	5,72	3,43	0,83	-4,55
Jumlah penduduk (000 org)	630	644	657	670	683

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Konsumsi pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, menunjukkan total konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 3.333,36 miliar. Kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2020 Rp. 4.511,35 miliar. Sejalan dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku, konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, juga menunjukkan hal yang sama hingga tahun 2019. Pada tahun 2020, konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan menunjukkan penurunan dari sebesar Rp. 2.625,49 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 2.554,68 miliar pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 tersebut mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Peranan komponen pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB juga mengalami tren yang berfluktuasi. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB paling besar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,17 persen. Proporsi paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu hanya sebesar 6,96 persen. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa komponen pengeluaran pemerintah selama lima tahun terakhir memiliki kontribusi terbesar pada tahun 2020 hingga mencapai 9,17 persen.

Pemerintah yang salah satu fungsinya adalah pembangunan, memiliki keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana bagi masyarakat. Pengeluaran yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran yang bersifat investasi yang berupa prasarana dasar dan sarana fisik, serta pengeluaran rutin yang diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi belanja pegawai, barang, perjalanan dinas, pemeliharaan, belanja rutin dan lain-lain.

Perkembangan komponen pengeluaran pemerintah rata-rata per kapita sejalan dengan perkembangan komponen pengeluaran total pemerintah. Konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 5.291,05 ribu, dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 6.603,26 ribu.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah selama periode lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2016 pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh mencapai 6,63 persen. Pada tahun berikutnya, konsumsi pemerintah mengalami percepatan pada tahun 2017 mencapai pertumbuhan 7,99 persen. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah cenderung melambat dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,59 persen dan pada tahun 2019 mencapai 2,87 persen, hingga mengalami kontraksi sebesar 2,70 pada tahun 2020.

3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto yang lebih dikenal dengan investasi merupakan komponen pengeluaran PDRB yang berhubungan erat dengan proses kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan produksi (output) di masa yang akan datang. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Peranan ini bersumber dari beberapa fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan kesempatan kerja. Pertambahan modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.

Investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih baik, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Namun dalam perkembangannya diharapkan investasi yang dilakukan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan. Bagaimanapun, investasi yang disertai dengan perusakan lingkungan hanya akan menimbulkan masalah baru, bahkan mengurangi kesejahteraan penduduk yang bernaung di dalamnya.

Dampak pengganda yang diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumber daya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

Pada periode 2016-2019, pengeluaran PMTB Kabupaten Badung selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 besaran PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 17.522,48 miliar. Selanjutnya meningkat secara terus menerus hingga menjadi Rp. 22.461,08 miliar pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 20.214,40 miliar.

Besaran komponen PMTB Kabupaten Badung sebagian besar didukung oleh adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Secara proporsi, komponen PMTB memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Badung.

Proporsi PMTB terhadap PDRB selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 proporsi PMTB sebesar 37,13 persen, kemudian menurun menjadi 36,16 persen pada tahun 2017. Tahun 2018 proporsi PMTB kembali mengalami peningkatan menjadi 37,08 persen. Proporsi PMTB terhadap PDRB tertinggi selama lima tahun terakhir sebesar 41,07 persen pada tahun 2020.

TABEL 11.
Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Badung, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	17 522,48	18 927,17	21 428,96	22 461,08	20 214,40
b. ADHB 2010 (Miliar Rp)	12 890,37	13 644,66	14 795,04	15 403,79	13 412,63
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	37,12	36,16	37,08	35,81	41,07
Pertumbuhan⁹ (%)	8,71	5,85	8,43	4,11	-12,93

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan komponen PMTB Kabupaten Badung juga mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Tahun 2016 pertumbuhan komponen PMTB mencapai 8,71 persen. Tahun 2017 pertumbuhan komponen PMTB kembali mengalami

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

perlambatan menjadi 5,85 persen. Penyelesaian beberapa proyek seperti jalan dan *underpass* dalam rangka persiapan *Annual Meeting IMF* dan *World Bank* pada tahun 2018 mendorong pertumbuhan komponen PMTB di Kabupaten Badung hingga tumbuh menjadi 8,43 persen. Di tahun 2019, pertumbuhan PMTB berhasil mencapai 4,11 persen. Sedangkan tahun 2020 pertumbuhan PMTB berkontraksi menjadi -12,93 persen.

3.6. Perkembangan Perubahan Inventori

Perubahan inventori merupakan komponen dengan proporsi terendah dalam struktur PDRB Kabupaten Badung. Komponen ini hanya berkontribusi sekitar 0,29 sampai 0,38 persen selama lima tahun terakhir. Inventori merupakan persediaan barang (baik barang jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya

penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Perkembangan perubahan inventori selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018, perubahan inventori cenderung mengalami peningkatan hingga di tahun 2018 mencapai Rp. 216,53 miliar. Pada tahun 2019, perubahan inventori cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp. 185,77 miliar. Tahun 2020 perubahan inventori menurun menjadi 143,68 miliar.

TABEL 12.
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Badung, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	139,79	198,32	216,53	185,77	143,68
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	64,37	68,81	72,93	67,36	60,62
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,30	0,38	0,37	0,30	0,29

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Begitu pula halnya dengan perubahan inventori atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 komponen ini mencapai sebesar Rp. 64,37 miliar. Kemudian mengalami peningkatan hingga pada

tahun 2018 mencapai Rp. 72,93 miliar. Pada tahun 2019, perubahan inventori Kabupaten Badung mencapai Rp. 67,36 miliar dan tahun 2020 mencapai 60,62 miliar.

3.7. Perkembangan Net Ekspor Barang Dan Jasa Luar Negeri

Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda satu sama lain. Suatu wilayah akan membutuhkan komoditi yang tidak tersedia di wilayahnya tetapi tersedia di wilayah lain, maka daerah tersebut akan melakukan perdagangan atau pertukaran komoditi dengan wilayah lainnya. Wilayah tersebut memberlakukan sistem perekonomian terbuka dimana antar wilayah melakukan kegiatan pertukaran baik barang maupun jasa. Demikian pula halnya dengan yang dilakukan di Kabupaten Badung, dimana Kabupaten Badung melakukan perdagangan baik ekspor ke luar wilayah Badung, dan juga mendatangkan barang dan jasa dari luar wilayah Badung (impor).

Idealnya ekspor yang dilakukan adalah merupakan barang jadi sehingga nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Badung bisa menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan mengekspor barang mentah atau setengah jadi. Sebaliknya idealnya impor yang dilakukan sebaiknya adalah barang modal, mesin-mesin dan lain sebagainya yang peruntukannya untuk menunjang kegiatan produksi yang ada di Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung merupakan pusat destinasi para wisatawan mancanegara di Provinsi Bali. Banyaknya Objek dan Daya

Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Badung membuka peluang yang sangat besar untuk melakukan ekspor jasa kepada wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik yang berasal dari luar Kabupaten Badung.

TABEL 13.
Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Badung, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	6 662,48	8 489,19	9 170,43	11 027,65	(343,92)
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	1 535,66	1 885,31	2 110,74	2 618,63	(763,13)
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	14,11	16,22	15,87	17,58	-0,70

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Di sisi lain, sebagai wilayah yang mengembangkan sistem ekonomi terbuka dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di wilayahnya, Kabupaten Badung tidak bisa terlepas dari adanya produk dari luar wilayah Badung. Produk dari luar wilayah Badung tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai aktivitas pengeluaran, baik itu konsumsi rumah tangga, LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB termasuk inventori serta pengeluaran atas ekspor. Oleh karena itu, lalu lintas perdagangan ekspor maupun

impor terjadi di Kabupaten Badung yang dalam hal ini dapat tercermin dalam net ekspor.

Kondisi yang tidak biasa dialami oleh seluruh dunia akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020. Kabupaten Badung juga tidak lepas dari dampak pandemi tersebut. Selama periode tahun 2016-2019 nilai net ekspor Kabupaten Badung selalu bernilai positif dan mengalami peningkatan. Adanya peningkatan nilai net ekspor dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa nilai ekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Badung lebih tinggi dari impor yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan pada tahun 2020, nilai net ekspor Kabupaten Badung bernilai negatif, dimana hal ini menggambarkan bahwa nilai ekspor yang dilakukan lebih kecil daripada nilai impor. Dalam hal ini, dampak pandemi covid-19 sangat terlihat. Penutupan bandara sebagai akses ekspor jasa dan barang kepada para wisatawan menyebabkan proses ekspor ke luar daerah maupun ke luar negeri terhambat sehingga nilai ekspor berkurang.

Pada tahun 2016, nilai net ekspor atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 6.662,48 miliar. Memasuki tahun 2017 nilai net ekspor kembali mengalami peningkatan, dimana nilai net ekspor mencapai Rp. 8.489,19 miliar, dan mencapai Rp. 9.170,43 miliar pada tahun 2018. Pada tahun 2019 net kinerja ekspor Kabupaten Badung kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp. 11.027,65 miliar. Namun,

pada tahun 2020 net ekspor Kabupaten Badung berkontraksi menjadi -343,92 miliar.

Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku, nilai net ekspor atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu mengalami tren peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nilai “riil” pada masing-masing tahun adalah sebesar Rp. 1.535,66 miliar (2016); Rp. 1.885,31 miliar (2017); Rp. 2.110,74 miliar (2018) serta 2.618,63 miliar pada tahun 2019. Sedangkan net ekspor atas dasar harga konstan tahun 2020 berkontraksi menjadi -763,13 miliar.

Nilai net ekspor Kabupaten Badung memang mengalami peningkatan selama periode 2016-2019, namun proporsi terhadap PDRB tidak selalu mengalami peningkatan. Tahun 2016 proporsi nilai net ekspor terhadap PDRB adalah sebesar 14,11 persen. Tahun berikutnya proporsi nilai net ekspor terhadap PDRB mengalami peningkatan menjadi 16,22 persen pada tahun 2017. Perkembangan proporsi nilai net ekspor pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 15,87 persen dan pada tahun 2019 proporsi nilai net ekspor kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 17,67 persen. Sedangkan pada tahun 2020 proporsi nilai net ekspor sebesar -0,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih besar dibandingkan dengan ekspor yang terjadi di Kabupaten Badung.



Bab 4

Perkembangan Agregat
PDRB Kabupaten Badung
Menurut Pengeluaran

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

TABEL 14.

**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Badung, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	47 208,17	52 343,65	57 791,25	62 723,36	49 215,26
- ADHK 2010	31 157,37	33 052,05	35 275,42	37 325,33	31 159,95
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	74 933,60	81 342,12	87 975,72	93 589,02	72 036,38
- ADHK 2010	49 456,15	51 362,93	53 699,84	55 692,82	45 608,82
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	4,51	3,86	4,55	3,71	-18,11
Jumlah penduduk (000 org)	630	644	657	670	683
Pertumbuhan (%)	2,21	2,14	2,08	2,02	1,94

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selama periode tahun 2016 sampai tahun 2019 terlihat bahwa PDRB perkapita Kabupaten Badung mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan nilai nominal PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Namun, kondisi berbeda

pada tahun 2020 dimana PDRB perkapita Kabupaten Badung mengalami penurunan. Besaran PDRB perkapita Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp. 74,93 juta meningkat menjadi Rp. 93,59 juta pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi Rp. 72,04 juta pada tahun 2020. Sedangkan berdasarkan atas harga konstan 2010, PDRB perkapita Kabupaten Badung meningkat dari Rp. 49,46 juta (2016) menjadi Rp. 55,69 juta (2019) dan menurun menjadi Rp. 45,61 juta pada tahun 2020.

Pada kondisi normal, pertumbuhan PDRB perkapita didukung oleh adanya penambahan penduduk di Kabupaten Badung. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan migrasi yang disebabkan karena Kabupaten Badung dianggap sebagai daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Sebagai daerah destinasi pariwisata tentunya Kabupaten Badung membuka peluang kerja yang sangat besar dan menjadi incaran bagi pencari kerja baik penduduk Badung sendiri maupun penduduk luar Kabupaten Badung. Kumpulan penduduk ini melakukan aktivitas ekonomi sehingga menambah nilai tambah ekonomi di setiap lapangan usaha yang ada. Selain menambah nilai tambah dari tiap lapangan usaha, penduduk ini juga melakukan kegiatan konsumsi yang tercermin pada PDRB pengeluaran. Namun adanya pandemi covid-19 membuat struktur ekonomi masyarakat berubah. Penduduk migran sebagian besar kembali ke daerah asal karena sudah tidak ada penghasilan akibat pariwisata yang tidak berjalan sebagaimana biasa.

Sementara itu, pendapatan penduduk asli Bali yang masih tinggal di Kabupaten Badung mengalami penurunan terutama untuk pekerja pariwisata yang dirumahkan maupun diberhentikan karena perusahaan tempat bekerja mengalami kebangkrutan. Penurunan pendapatan ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berakibat pada menurunnya PDRB perkapita secara umum di Kabupaten Badung.

Pertumbuhan PDRB perkapita dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 pertumbuhannya mencapai 4,51 persen. Pada tahun 2017 mengalami perlambatan kembali dimana pertumbuhan PDRB perkapita menjadi 3,86 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami percepatan menjadi 4,55 persen, dan kembali mengalami perlambatan di tahun 2019 menjadi 3,73 persen. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB perkapita berkontraksi sehingga menjadi -18,11 persen.

4.2. Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi

Akhir Rumah Tangga Terhadap Net Ekspor

Perbandingan ini merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar produk yang dikonsumsi rumah tangga jika dibandingkan dengan selisih produk yang diekspor ke luar wilayah maupun produk impor yang masuk wilayah Kabupaten Badung. Pada tahun 2016 perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai net ekspor adalah sebesar 2,90, yang artinya konsumsi

rumah tangga lebih tinggi sebesar 2,90 kali dibandingkan dengan nilai net ekspor atau net ekspor lebih kecil 0,35 kali lipat jika dibandingkan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Badung. Nilai net ekspor yang lebih kecil dari nilai konsumsi rumah tangga juga terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Tahun 2017 nilai konsumsi rumah tangga lebih besar 2,43 kali, tahun 2018 lebih besar 2,45 kali, dan tahun 2019 lebih besar 2,21 kali dibandingkan dengan net ekspor di Kabupaten Badung. Sedangkan kondisi pada tahun 2020 net ekspor di Kabupaten Badung berkontraksi mencapai -343,92 miliar artinya nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor.

TABEL 15.
Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir
Rumah Tangga terhadap Net Ekspor 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	19.303,78	20.631,80	22.501,87	24.356,43	24.368,64
Total Net Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	6.662,48	8.489,19	9.170,43	11.027,65	(343,92)
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Net Ekspor	2,90	2,43	2,45	2,21	-70,86

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Nilai net ekspor Kabupaten Badung yang relatif kecil disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan pengeksportor jasa terbesar sekaligus pengimpor barang dan jasa terbesar di Provinsi Bali. Ekspor jasa ini dapat berupa pelayanan jasa terhadap para wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang berasal dari luar Kabupaten Badung. Sementara kegiatan impor yang dilakukan oleh Kabupaten Badung merupakan impor barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk masyarakatnya tetapi juga untuk wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung. Selain itu impor jasa juga dilakukan oleh Kabupaten Badung karena banyak pekerja dari luar Kabupaten Badung yang bekerja di Kabupaten Badung. Sementara pada tahun 2020, pandemi covid-19 menyebabkan pariwisata Bali khususnya di Kabupaten Badung mengalami penurunan. Hal ini berdampak secara langsung terhadap penurunan ekspor impor barang dan jasa untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.

4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Jika kita melihat besarnya rasio antara konsumsi rumah tangga dengan besarnya PMTB, akan terlihat besarnya perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan besarnya investasi yang ada di Kabupaten Badung. Secara makro ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan baik jika penggerak pertumbuhan ekonomi adalah

investasi, hal ini disebabkan karena dengan investasi maka akan menciptakan multiplier efek bagi ekonomi wilayah tersebut.

TABEL 16.
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	19.303,78	20.631,80	22.501,87	24.356,43	24.368,64
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	17.522,48	18.927,17	21.428,96	22.461,08	20.214,40
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,10	1,09	1,05	1,08	1,21

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Perkembangan nilai perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB di Kabupaten Badung cenderung sama dari tahun 2016 sampai 2020 seperti yang terlihat pada Tabel 16 di atas. Nilai perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB berkisar antara 1,05 sampai 1,21. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran makro terhadap konsumsi rumah tangga selalu lebih besar dibandingkan terhadap pembentukan investasi di Kabupaten

Badung. Namun perbedaan pengeluaran makro konsumsi rumah tangga dan investasi tidak terlalu besar.

4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Hampir separuh barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Badung digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir pada tahun 2016-2019. Hal ini terlihat dari proporsi permintaan akhir yang berada pada kisaran 46,31-48,47 persen. Sedangkan pada tahun 2020 proporsi konsumsi akhir sudah mencapai 59,33 persen dari PDRB Kabupaten Badung. Jika diperhatikan selama periode 2016-2019, proporsi konsumsi akhir cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 konsumsi akhir sebesar 48,47 persen. Pada tahun 2017 hingga 2019 konsumsi akhir cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 46,31 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 59,33 persen. Meskipun total nilai konsumsi

akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan, dengan kata lain laju peningkatan PDRB secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir.

TABEL 17.
Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Badung, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	19.303,78	20.631,80	22.501,87	24.356,43	24.368,64
b. LNPRT	246,28	260,01	288,25	327,84	321,11
c. Pemerintah	3.333,36	3.837,17	4.185,21	4.364,59	4.511,35
	22.883,42	24.728,98	26.975,33	29.048,86	29.201,09
Jumlah					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	47.208,17	52.343,65	57.791,25	62.723,36	49.215,26
Proporsi	48,47	47,24	46,68	46,31	59,33

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.5. Perbandingan Net Ekspor Terhadap PMTB

Dalam perekonomian makro, penambahan investasi dalam hal ini PMTB, secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai net ekspor. Investasi yang terjadi di wilayah domestik Kabupaten Badung tentunya dapat meningkatkan kinerja ekspor yang tercermin dari

nilai net ekspor yang positif. Misalnya saja penambahan investasi berupa barang modal di pertanian akan meningkatkan produksi pertanian itu sendiri sehingga selain akan dikonsumsi oleh penghuni domestik wilayah Badung, juga akan diperdagangkan ke luar wilayah Badung (mengekspor). Begitu pula halnya jika terjadi pada lapangan usaha industri, dimana penambahan investasi di pabrik-pabrik dan wilayah industri lainnya tentunya akan meningkatkan produksi dari industri pengolahan, bisa berupa modal ataupun berupa penambahan mesin-mesin baru.

TABEL 18.
Rasio Net Ekspor terhadap PMTB (ADHB) 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	6.662,48	8.489,19	9.170,43	11.027,65	(343,92)
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	17.522,48	18.927,17	21.428,96	22.461,08	20.214,40
Rasio Net Ekspor terhadap PMTB	0,38	0,45	0,43	0,49	-0,02

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 18. di atas menunjukkan bahwa nilai PMTB selalu mengalami peningkatan selama tahun 2016 sampai 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Seiring dengan kenaikan PMTB, nilai net ekspor Kabupaten Badung juga mengalami

peningkatan. Investasi di bidang pariwisata tentunya membawa dampak besar terhadap perkembangan ekspor khususnya ekspor jasa di Kabupaten Badung. Walaupun demikian, fenomena yang terjadi di Badung adalah sebagian besar para investor di bidang pariwisata ini bukanlah penduduk Kabupaten Badung, melainkan penduduk wilayah luar Badung, sehingga keuntungan yang didapat sebagian mengalir ke luar wilayah Kabupaten Badung. Sementara pada tahun 2020, pandemi covid-19 menyebabkan perubahan besar terhadap perekonomian Kabupaten Badung dimana net ekspor berkontraksi dan PMTB berkurang.

4.6. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi valuta asing yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar Kabupaten Badung (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran valuta asing masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran valuta asing keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

TABEL 19.
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Badung
2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	6.662,48	8.489,19	9.170,43	11.027,65	(343,92)
Rasio Net Ekspor thdp PDRB	14,11	16,22	15,87	17,58	-0,70

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 19 menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Badung tahun 2015 sampai 2019 mengalami surplus neraca perdagangan. Hal ini disebabkan karena nilai impor lebih kecil dibandingkan nilai ekspor, sehingga terjadi aliran dana devisa masuk

dari luar wilayah Badung menuju dalam wilayah Badung. Masing-masing besaran net ekspor Kabupaten Badung pada periode 2016 sampai 2019 adalah Rp. 6.662,48 miliar, Rp. 8.489,19 miliar, Rp. 9.170,43 miliar, dan Rp. 11.027,65 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 neraca perdagangan barang dan jasa mengalami defisit. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan ekspor barang dan jasa kepada wisatawan mengalami hambatan. Akibatnya net ekspor Kabupaten Badung tahun 2020 terkontraksi hingga menjadi -343,92 miliar.

4.7. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Salah satu indikator yang dapat diturunkan dari penghitungan PDRB pengeluaran adalah besaran ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Besaran ini dapat menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Dengan kata lain dapat diartikan secara lebih sederhana yaitu suatu besaran yang menggambarkan seberapa besar investasi yang diperlukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke $t-1$

TABEL 20.

Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Badung, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	31 157,37	33 052,05	35 275,42	37 325,33	31 159,95
Perubahan (miliar rupiah)	1 987,13	1 894,68	2 223,37	2 049,91	(6 165,38)
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	12 890,37	13 644,66	14 795,04	15 403,79	13 412,63
ICOR	6,49	7,20	6,65	7,51	n.a

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara



Bab 5

Penutup

5.1 KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga menjadi -16,52 persen. Kondisi yang tidak biasa ini terjadi karena sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang melanda dunia. Pandemi ini menyebabkan struktur ekonomi menjadi berubah. Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak besar akibat pandemi. Sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terkenal hingga mancanegara, kondisi ekonomi Kabupaten Badung terkena dampak langsung setelah adanya pandemi. Penutupan bandara sebagai akses keluar masuk wilayah Kabupaten Badung menyebabkan pariwisata di Kabupaten Badung menjadi lumpuh. Akibatnya banyak para pekerja di sektor pariwisata dan penunjang pariwisata yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Pendapatan yang menurun, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dengan kondisi yang sulit ini, banyak penduduk migran yang tinggal di Kabupaten Badung memilih untuk kembali ke daerah asal. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami kontraksi hingga menjadi -16,52 persen tahun 2020. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung merupakan terendah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Bali, padahal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun sebelumnya berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali maupun nasional.

Besaran nominal PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp. 62,72 triliun atau Rp 37,33 triliun atas dasar harga konstan 2010. Sedangkan pada tahun 2020 besaran nominal PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 49,21 triliun atau 31,16 triliun atas dasar harga konstan 2010. Pendapatan PDRB perkapita Kabupaten Badung juga mengalami penurunan dari tahun 2019. Walaupun demikian, angka ini belum dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Badung karena PDRB diperoleh dengan menghitung aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Badung tanpa melihat asal input ekonomi yang terjadi.

Kontribusi dominan untuk PDRB Kabupaten Badung tahun 2020 adalah dari komponen konsumsi akhir rumah tangga dan pembentukan modal tetap domestik bruto. Masing-masing memberikan sumbangan sebesar 49,51 persen dan 41,07 persen. Dilihat dari perdagangan luar wilayah, nilai ekspor untuk tahun 2020 lebih kecil daripada nilai impor. Kabupaten Badung merupakan destinasi pariwisata terbesar di Bali. Namun, adanya pandemi covid-19 menyebabkan ekspor jasa kepada para wisatawan terhambat, begitu pula dengan ekspor barang karena adanya penutupan bandar udara Ngurah Rai. Hal ini menyebabkan net ekspor Kabupaten Badung pada tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga menjadi -0,70 persen.

5.2 Saran

Pemulihan kondisi ekonomi Kabupaten Badung di masa pandemi covid-19 salah satunya dapat dilakukan dengan menjaga pola konsumsi masyarakat. Sosialisasi terhadap masyarakat untuk membudayakan konsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah Badung sendiri juga perlu menjadi perhatian bersama. Dorongan adanya pola konsumsi masyarakat yang menggunakan produk lokal dan tidak mengandalkan produk luar daerah akan mendorong perekonomian Kabupaten Badung sehingga tidak menimbulkan kondisi net impor. Namun hal ini perlu upaya untuk memperbaiki kualitas produk sendiri.

Selain itu, untuk mendorong peningkatan perekonomian dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan ekspor khususnya ekspor jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya penataan kembali dan meningkatkan kualitas pariwisata sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 sehingga memiliki peluang yang besar untuk melakukan ekspor jasa kepada para wisatawan.



Lampiran

Lampiran 1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung,
2016-2020 (Miliar Rupiah).

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	19.303,8	20.631,8	22.501,9	24.356,4	24.368,6
2. Konsumsi LNPRT	246,3	260,0	288,3	327,8	321,1
3. Konsumsi Pemerintah	3.333,4	3.837,2	4.185,2	4.364,6	4.511,3
4. PMTB	17.522,5	18.927,2	21.429,0	22.461,1	20.214,4
5. Perubahan Inventori	139,8	198,3	216,5	185,8	143,7
6. Net Ekspor	6.662,5	8.489,2	9.170,4	11.027,6	(343,9)
Total PDRB	47.208,2	52.343,7	57.791,3	62.723,4	49.215,3

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Badung,
2016-2020 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	14.272,7	14.873,8	15.568,5	16.414,9	15.705,0
2. Konsumsi LNPRT	156,0	162,4	176,0	195,2	190,1
3. Konsumsi Pemerintah	2.238,3	2.417,1	2.552,1	2.625,5	2.554,7
4. PMTB	12.890,4	13.644,7	14.795,0	15.403,8	13.412,6
5. Perubahan Inventori	64,4	68,8	72,9	67,4	60,6
6. Net Ekspor	1.535,7	1.885,3	2.110,7	2.618,6	(763,1)
Total PDRB	31.157,4	33.052,0	35.275,4	37.325,3	31.159,9

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Badung,
2016-2020 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	40,89	39,42	38,94	38,83	49,51
2. Konsumsi LNPRT	0,52	0,50	0,50	0,52	0,65
3. Konsumsi Pemerintah	7,06	7,33	7,24	6,96	9,17
4. PMTB	37,12	36,16	37,08	35,81	41,07
5. Perubahan Inventori	0,30	0,38	0,37	0,30	0,29
6. Net Ekspor	14,11	16,22	15,87	17,58	-0,70
Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Badung 2016-2020 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,70	4,21	4,67	5,44	-4,32
2. Konsumsi LNPRT	6,62	4,08	8,40	10,89	-2,61
3. Konsumsi Pemerintah	6,63	7,99	5,59	2,87	-2,70
4. PMTB	8,71	5,85	8,43	4,11	-12,93
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	6,81	6,08	6,73	5,81	-16,52

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5.

Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Badung 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	135,25	138,71	144,53	148,38	155,16
2. Konsumsi LNPRT	157,84	160,11	163,74	167,94	168,91
3. Konsumsi Pemerintah	148,93	158,75	163,99	166,24	176,59
4. PMTB	135,93	138,71	144,84	145,82	150,71
5. Perubahan Inventori	217,15	288,20	296,90	275,77	237,02
6. Net Ekspor	132,67	144,75	145,80	140,32	134,32
Total PDRB	115,28	130,90	130,85	121,83	125,92

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6.

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit
Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Badung 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,29	2,56	4,20	2,66	4,57
2. Konsumsi LNPRT	3,59	1,44	2,27	2,57	0,57
3. Konsumsi Pemerintah	5,74	6,60	3,30	1,37	6,23
4. PMTB	2,08	2,05	4,41	0,67	3,36
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Total PDRB	4,17	4,52	3,45	2,57	-6,01

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
- Enlighten The Nation -



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG**